

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka. Esensi dari demokrasi dapat dirangkum dalam frasa “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, ini adalah sistem paling ideal bagi masyarakat karena menjadi modal sosial pembangunan bangsa yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil untuk setiap warga negara.

Pemilihan umum menjadi peristiwa politik yang melibatkan partisipasi luas seluruh warga negara, baik secara langsung sebagai pemilih maupun secara tidak langsung melalui dukungan terhadap partai politik atau calon kandidat. Dengan demikian, pemilihan umum bukan sekedar formalitas, tetapi juga wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingannya dalam sistem kenegaraan.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dibutuhkan suatu bentuk partisipasi sebagai wujud dari kebersamaan dan keterlibatan dalam proses politik. Bentuk keterlibatan ini melibatkan seluruh warga negara termasuk melibatkan berbagai pihak dari kelompok sosial manapun karena salah satu fondasi penting dalam mendukung sistem politik yang demokratis adalah partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. Agar partisipasi dapat tumbuh, dibutuhkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam bentuk tindakan nyata yang menerima dan mengakui kesetaraan, transparansi, serta perbedaan pendapat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Miriam Budiardjo (2010: 367), menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Demikian juga menurut Herbert McCloky bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kegiatan itu mencakup

tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politisi atau pemerintah.

Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan politik warga negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Menurut Ramlan Surbakti (2008: 143), partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, partisipasi aktif yang merujuk pada bentuk kegiatan yang berorientasi pada input dan output politik, seperti pengajuan usul terkait kebijakan, kritik beserta saran perbaikan untuk mengoreksi kebijakan yang ada, membayar pajak, serta memilih pemimpin pemerintahan. Kedua, partisipasi pasif yaitu kegiatan terbatas yang hanya berorientasi pada output politik, misalnya hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan pemerintah tanpa disertai kritik atau usulan perbaikan apa pun.

Menurut Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah berbagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, termasuk partisipasi politik yang sifatnya sukarela dan perilaku memilih dalam pemilihan umum sebagai salah satu bentuknya.

Perilaku politik mencakup aktivitas yang berkaitan dengan proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam politik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pada umumnya ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme serta kehendak hati, juga faktor eksternal seperti kondisi lingkungannya, kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Perilaku politik purnawirawan TNI sebagai pemilih baru pasca pension tidak dapat dilihat hanya dari tingkat keikutsertaan dalam pemilu, melainkan melalui orientasi nilai, dasar pengambilan keputusan atau rasionalitas memilih, pola akses informasi, serta sikap terhadap demokrasi dan konflik politik. Tolak ukur perilaku politik tersebut berhubungan erat dengan bentuk partisipasi yang ditampilkan, baik aktif maupun pasif.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat, ini berarti bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai hak serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masyarakat dan kegiatan politik adalah ukuran untuk menilai seberapa jauh seseorang terlibat dalam politik. Pengalaman dari pemilihan umum yang telah berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tingkat kesadaran politik serta kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka perilaku politiknya cenderung lebih aktif. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran

politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka perilaku politik cenderung aktif, sebaliknya, apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka perilaku politik menjadi pasif.

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Aturan tentang syarat pemilih dalam pemilihan umum telah termuat dalam pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yakni : genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah atau pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP atau e-KTP, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP atau e-KTP, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Makassar							
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	JumlahTPS	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbalkan Data Pemilih	Potensial Non KTP-EI
15	153	4.004	1.036.941	1.202	4.842	103	18.254

Sumber: Sulsel.kpu.go.id. Diakses pada 18 november 2025

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Bab IV pasal 200 menjelaskan bahwa secara normatif anggota TNI/POLRI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Namun, untuk dapat menggunakan hak pilihnya WNI (Warga Negara Indonesia) harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) seperti yang tertera dalam pasal 199. Dalam peraturan KPU No. 7 tahun 2023 pasal 19 ayat (3) huruf (e) bahwa petugas Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) melaksanakan coklit (Pencocokan dan Penelitian) untuk mencatat data pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI/POLRI menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI/POLRI.

Dengan mereka yang memperoleh hak pilih dalam praktik pemilihan dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula pasca pensiun karena baru pertama kali menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pasal 198 ayat (2) sebagaimana pada ayat (1) di daftar 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mereka berperan dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, memahami visi-misi kandidat, menolak politik uang dan kampanye negatif seperti SARA dan hoaks, serta menjadi pengawas partisipatif untuk memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Kelompok pemilih pemula termasuk dalam sasaran strategis yang memiliki antusias tinggi pada ajang pemilihan umum karena jumlahnya yang cukup besar serta karena baru pertama kali memberikan suara dalam pemilihan umum sehingga perlu mendapatkan arahan yang baik agar memahami persoalan demokrasi. Kelompok ini tergolong segmen unik karena semangat yang tinggi, relatif rasional, haus akan perubahan dan kemajuan. Prinsip yang dimiliki kelompok ini cukup gamang, tidak stabil dan mudah berubah-ubah ketika menentukan pilihan.

Ariana, Sukri, Dian Ekawaty. (2022) mengatakan kalangan pemilih pemula cenderung dianggap sebagai segmen yang secara politik belum benar-benar bertindak secara *independent* terkait dengan partisipasinya dalam sistem demokrasi. Hal ini terkait dengan tingkat pemahaman dan preferensi politik yang dimiliki sebagai faktor yang mestinya menjadi dasar bagi perilaku politik dan partisipasinya dalam politik. Artinya kelompok pemilih pemula masih cukup bergantung pada aspek lain di luar diri mereka dalam menentukan pilihan politik sebagai salah satu alasan untuk terlibat dalam pesta demokrasi. Kondisi ini yang menjadikan kelompok ini sering terabaikan dan cenderung dianggap masih sangat bergantung pada faktor lain di luar dirinya sebagai faktor pembentuk preferensi politiknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dkk. (2024) menganalisis pengaruh perilaku sosiologis, psikologis, dan rasional terhadap pilihan politik pensiunan TNI AD pada Pilpres 2024 di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek perilaku tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap preferensi politik purnawirawan, di mana sentimen etnis, kedekatan emosional dengan partai politik, serta kesesuaian program pasangan calon terbukti memengaruhi keputusan memilih para responden. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan tidak menggali pengalaman subjektif maupun dinamika internal purnawirawan sebagai pemilih yang baru memulai pengalaman elektoral sehingga proses pembentukan preferensi politik tidak dijelaskan secara mendalam.

Maka dari itu penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini akan digunakan untuk menggali pengalaman politik, persepsi, dan pertimbangan subjektif purnawirawan dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara mereka membentuk preferensi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifa (2024) menemukan bahwa purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal menunjukkan bentuk partisipasi politik yang sepenuhnya bersifat konvensional, baik dalam pemilu maupun di luar pemilu. Dalam pemilu, para purnawirawan berada pada level *spectator*, ditandai dengan penggunaan hak pilih secara konsisten dan kesadaran individu sebagai warga negara. Sementara itu, dalam aktivitas politik di luar pemilu, mereka berada pada tingkat *gladiator* dengan keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti RT, LPMD, BPD, PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP POLRI, LVRI, DHC 45 serta sebagian kecil terlibat dalam struktur partai politik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang militer yang membawa modal sosial, disiplin, dan jejaring komando berkontribusi besar dalam mendorong keterlibatan politik setelah masa pensiun. Namun, fokus penelitiannya hanya pada bentuk partisipasi, bukan motivasi, dinamika internal, atau proses pembentukan preferensi politik purnawirawan. Selain itu, penelitian tersebut tidak membedakan karakteristik politik antar matra dan tidak membahas bagaimana pengalaman institusional militer membentuk cara purnawirawan memaknai hak pilih setelah lebih dari tiga dekade tidak melakukan aktivitas elektoral.

Selama masa dinas, anggota TNI dibentuk melalui sistem hierarkis, kepatuhan yang mutlak terhadap perintah, serta netralitas politik. Setelah pensiun dan masuk ke dunia politik sebagai warga sipil, kebiasaan tersebut tidak berubah secara instan. Hal ini mengakibatkan perilaku memilih mereka sering kali tidak sepenuhnya independen sebagai individu yang rasional, tetapi masih terpengaruh oleh pola pikir kolektif, kesetiaan korps, atau kecenderungan terhadap sosok otoritas. Ini merupakan suatu penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi mengenai pilihan individu yang bebas, bukan bayangan dari struktur perintah yang lama. Sebagai pemilih pemula, mereka belum punya pengalaman elektoral sebelumnya untuk membandingkan narasi, janji, atau rekam jejak kandidat. Namun, ikatan sosial kuat melalui paguyuban, organisasi purnawirawan, dan relasi senior-junior memfasilitasi pembentukan preferensi politiknya.

Sebagaimana diketahui bahwa, purnawirawan TNI secara hukum telah menyelesaikan masa dinasnya dan memiliki hak politik penuh sebagai warga sipil, berbeda dengan prajurit aktif yang wajib netral. Sebagai warga

negara yang memenuhi syarat, mereka dapat menyuarakan preferensi politik mereka dalam pemilihan umum. Namun, latar belakang kedinasan mereka menciptakan dinamika perilaku yang berbeda. Kesenjangan terletak pada transisi identitas dan budaya dari individu yang terikat komando aktif menjadi warga sipil yang bebas. Sebagian besar studi belum menjelaskan bagaimana pengalaman kedinasan, internalisasi identitas militer, dan transisi ke sipil membentuk pengalaman pertama menggunakan hak pilih.

Fenomena ini menempatkan proses transisi sebagai adaptasi individu dari pergeseran identitas, kehilangan peran komando, dan kesulitan integrasi sebagai masyarakat sipil yang bebas seperti pada umumnya, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan elektoral. Akibatnya, hubungan antara perubahan identitas dengan pembentukan preferensi politik dan perilaku memilih belum menjelaskan secara komprehensif.

Pengaruh struktur komando terhadap perilaku memilih bekerja melalui internalisasi pola berpikir dan relasi otoritas yang terbentuk selama individu berada dalam sistem militer. Struktur komando yang hierarkis, menekankan kepatuhan, serta kejelasan rantai otoritas membentuk kebiasaan di mana keputusan tidak selalu dihasilkan dari evaluasi mandiri yang mendalam, melainkan dari kepercayaan pada figur yang dianggap lebih berwenang. Ketika individu tersebut menjadi purnawirawan dan masuk ke arena politik sebagai pemilih, pola ini tidak sepenuhnya hilang. Meskipun memiliki hak pilih penuh, identitas militer tidak sepenuhnya terlepas. Ada kalanya purnawirawan sulit untuk melepaskan diri dari kultur, hierarki, dan loyalitas korps yang telah mendarah daging. Hal ini dapat memengaruhi dan membentuk pola perilaku politik purnawirawan sebagai pemilih baru.

Struktur komando juga berpengaruh pada terbentuknya pola *voting* yang relatif homogen dalam jaringan purnawirawan. Relasi senior–junior yang tetap terjaga setelah pensiun memungkinkan terjadinya pengaruh struktural secara informal, di mana preferensi politik *elite* purnawirawan dapat menyebar dan diikuti oleh anggota jaringan lainnya. Ini bukan karena paksaan formal, tetapi karena kombinasi kepercayaan, solidaritas, dan kebiasaan mengikuti otoritas. Maka dari itu pilihan politik mereka menjadi kurang variatif dan lebih terikat pada figur atau kelompok tertentu dibandingkan pada pertimbangan kebijakan yang rasional dan independen.

Dampaknya, proses *voting* cenderung dipengaruhi bukan sepenuhnya dari hasil analisis pribadi terhadap program atau isu. Ini berkaitan erat dengan konsep *bounded rationality* yang dijelaskan oleh Herbert A. Simon, di mana individu tidak mengambil keputusan melalui kalkulasi rasional yang sepenuhnya bebas, melainkan melalui proses yang disederhanakan oleh pengalaman, kebiasaan, dan struktur otoritas yang sudah terinternalisasi. Ini

terjadi karena keterbatasan informasi dan kapasitas individu yang membuat mereka menyederhanakan pilihan sehingga membentuk cara berpikir yang menyederhanakan pengambilan keputusan melalui *heuristic* seperti loyalitas, kedekatan institusional, atau reputasi figur. Struktur komando memperkuat kecenderungan ini karena sejak awal mendoktrin individu untuk meminimalkan ambiguitas dengan mengikuti arahan otoritas yang mereka anggap berwenang atau kredibel.

Pemilih pemula penting untuk mendapatkan perhatian dalam sistem politik tidak hanya karena faktor pembentuk preferensi politiknya tetapi juga terkait dengan jumlah mereka yang cukup besar di setiap wilayah, salah satunya adalah di Kota Makassar. Data menunjukkan bahwa terdapat 6.670.582 pemilih aktif dan 21.414 pemilih baru berdasarkan berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2524/PL.01.2-BA/73/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pemilihan umum tahun 2024, dari jumlah itu terdapat 1.202 jiwa pemilih pemula yang berada di Kota Makassar.

Fenomena perilaku politik purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula merujuk pada pola partisipasi politik mantan anggota TNI yang baru saja pensiun dan baru mulai berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini dikarenakan sejak reformasi 1998 Indonesia mendorong netralitas TNI dari politik praktis dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 39 yang menegaskan anggota TNI dan Polri aktif tidak terlibat dalam kegiatan politik termasuk menggunakan hak memilih dalam pemilu.

Anggota TNI aktif harus bersikap netral dan tidak memilih untuk menjaga netralitas militer. Namun setelah pensiun, mereka kehilangan status aktif dan diperbolehkan berpartisipasi sebagai warga sipil, sehingga mereka menjadi pemilih pemula setelah pensiun. Karena mereka sebelumnya terisolasi dari politik dan memiliki pola kebiasaan yang terdoktrin, maka perilaku politik mereka dalam memilih dapat mempengaruhi dinamika politik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Perilaku Politik Purnawirawan TNI Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman politik purnawirawan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana preferensi politik purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula pasca pensiun dalam Pilpres tahun 2024?
2. Faktor apa yang berperan menjelaskan rasionalitas politik purnawirawan TNI: faktor sosial, faktor psikologis, atau faktor rasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan preferensi politik purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula pasca pensiun pada Pilpres tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi serta mengkaji faktor apa yang berperan menjelaskan rasionalitas perilaku politik purnawirawan TNI memilih calon presiden dan wakil presiden tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan perilaku politik kelompok purnawirawan dalam konteks pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan kajian perilaku politik serta studi-studi yang menyoroti hubungan antara profesi militer di masa pensiun dengan orientasi politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait seperti partai politik, penyelenggara pemilihan umum, dan pengamat politik tentang karakteristik serta kecenderungan politik purnawirawan TNI dalam menentukan pilihan politiknya. Kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam perumusan strategi komunikasi politik dan peningkatan partisipatif politik yang lebih inklusif di masa mendatang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad F. Wiratama, Ananias Riyoan Philips Jacob, dan Frans B. Ricky Humau (2024) mengenai Partisipasi Politik Pensiunan TNI-AD Pada Pilpres 2024 (Studi Kasus Pensiunan TNI Yang Baru Menggunakan Hak Pilih di Kota Kupang) menunjukkan tiga aspek yang mendasari, yakni: (1) Perilaku Sosiologis yang berpengaruh kuat terhadap pilihan presiden. Purnawirawan cenderung memilih calon yang memiliki kesamaan latar sosial atau etnis dengan mereka. (2) Perilaku Psikologis, purnawirawan yang memiliki kedekatan emosional atau afiliasi terhadap partai politik pengusung calon tertentu cenderung memilih calon dari partai tersebut. Artinya, ikatan emosional dan loyalitas terhadap partai politik masih menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan presiden di kalangan purnawirawan TNI. (3) Perilaku Pilihan Rasional, pemilih rasional cenderung mempertimbangkan kesesuaian program calon dengan kebutuhan mereka, termasuk penilaian terhadap kesesuaian program dan rekam jejak calon, memainkan peran penting dalam menentukan pilihan presiden, dengan pemilih yang menganalisis secara rasional cenderung membuat keputusan yang logis.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Masyita Ainin Rifa (2024) mengenai Partisipasi Politik Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Tegal Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal memiliki tingkat partisipasi politik yang tergolong aktif dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Menurut teori Piramida Partisipasi Politik oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson, dalam pemilu mereka menggunakan hak pilihnya dengan sadar dan penuh tanggung jawab, sehingga tergolong sebagai *Spectator* (pengamat). Sebagian lainnya terlibat bergabung dalam organisasi sayap partai politik dan kegiatan sosial pasca pemilu, sehingga termasuk kategori *Gladiator* (partisipan aktif). Dan di luar pemilu, para purnawirawan juga berperan dalam lembaga kemasyarakatan, serta aktif di berbagai organisasi sosial. Ada pula yang menjadi bagian dari partai politik, seperti anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa purnawirawan TNI dan POLRI di Tegal berpartisipasi secara sadar, damai, dan konstruktif, mencerminkan kesadaran politik serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keutuhan NKRI.

Hasil penelitian Hijra, Dewi Anggraini, Iriyani Astuti Arief (2025) Analisis Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pilpres 2024 Studi Kasus di

Kelurahan Wundumbatu, Kota Kendari menunjukkan bahwa perilaku politik pemilih pemula dipengaruhi oleh tiga pendekatan utama, yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis menjadi yang paling dominan, di mana pilihan politik banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, terutama pengaruh keluarga. Pendekatan psikologis muncul melalui kedekatan emosional terhadap partai politik atau tokoh tertentu, sedangkan pendekatan rasional terlihat pada sebagian kecil pemilih yang menilai calon berdasarkan visi, misi, dan program kerja. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemilih pemula masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan emosional, namun menunjukkan potensi rasionalitas politik yang dapat berkembang melalui peningkatan pendidikan politik dan literasi demokrasi.

Penelitian Jianrenstra, M (2023) dalam skripsi menunjukkan bahwa perilaku pemilih purnawirawan TNI AD di Komplek Mabab pada Pilpres 2019 ditentukan oleh tiga pendekatan utama, yaitu sosiologis, psikologis, dan rasional. Dengan demikian, model pemilihan di kalangan purnawirawan bervariasi, beberapa dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang sosial dan persepsi rasional terhadap kinerja calon, sementara yang lainnya dipengaruhi oleh ikatan emosional dan isu politik yang berkaitan dengan kandidat.

Meskipun penelitian tersebut berhasil menjelaskan korelasi dan pengaruh tiga pendekatan perilaku pemilih, terdapat kesenjangan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan tidak mengeksplorasi dinamika identitas militer, pengalaman dinas, jaringan sosial, atau faktor kultur korps yang secara teoritis dapat membentuk preferensi politik. Penelitian tersebut tidak menganalisis bagaimana purnawirawan sebagai pemilih pemula sehingga membawa perspektif baru terkait transisi identitas politik pasca-pensiun.

1.6 Kerangka Konseptual Teoritis

Kerangka konseptual teoritis merupakan struktur dalam penelitian yang menggabungkan kerangka teori dan kerangka konsep untuk memberikan dasar argumentasi ilmiah yang valid dan kuat dalam menjawab permasalahan penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual, terdiri dari seperangkat ide, definisi, dan hipotesis yang saling berhubungan secara logis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis. Landasan ini disusun berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah terverifikasi. Sementara itu, kerangka konsep menghubungkan konsep-konsep utama dengan penekanan lebih antar variabel yang akan diuji. Kerangka ini sangat penting karena membantu

memusatkan fokus penelitian dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan secara praktis dan rasional.

Dalam sub bab ini akan dijelaskan kajian dan teori yang digunakan untuk melihat perilaku politik purnawirawan TNI di kota Makassar pada Pilpres tahun 2024. Adapun yang akan dikemukakan adalah konsep perilaku politik, konsep perilaku pemilih serta pendekatan perilaku, dan konsep *heuristic voting* untuk menganalisis keputusan politik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik.

1.6.1 Perilaku Politik

Perilaku politik adalah tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan proses politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan politik dengan keikutsertaan atas kemauan sendiri, di dasari atas rasa tanggungjawab dan dalam kebebasan berfikir, bertindak serta mengemukakan pendapat. Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:8) perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (dalam Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo 1990) yang mengatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok individu dalam masyarakat dan dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik yang pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Selain itu, definisi dan batasan yang lebih luas mengenai perilaku politik dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Ia memandang perilaku politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya dalam pemilihan pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Perilaku politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan lain sebagainya.

Singkatnya perilaku politik didefinisikan sebagai pola tindakan dan orientasi terhadap objek politik seperti pemerintah, partai, atau kebijakan yang mencerminkan keterlibatan aktif dalam proses politik. Menurut model ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yakni:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat tiga basis fungsional sikap untuk memahami struktur kepribadian, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri.

1.6.2 Perilaku Pemilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya dengan manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu lainnya. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku serta interaksi tersebut dapat ditandai akan menghasilkan perilaku politik.

Memilih merupakan aktivitas proses dalam menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik berupa eksklusif maupun inklusif. Ramlan Surbakti (1992: 145) mengemukakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Dalam mengkaji konsep perilaku pemilih, terdapat tiga teori pendekatan perilaku dalam mengkaji alasan pemilih memilih kandidat tertentu dalam pemilihan diantaranya:

- **Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis dalam perilaku pemilih didasarkan pada teori sosiologis yang dikembangkan oleh Mazhab Columbia yang dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld dkk. melalui penelitian

“*The People's Choice*” tahun 1944 yang menjelaskan perilaku pemilih sebagai hasil pengaruh faktor-faktor sosial struktural seperti kelas sosial, agama, etnis, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Teori ini menekankan konsep di mana individu terikat dalam berbagai lingkaran sosial silang-menyilang seperti keluarga, teman, tempat kerja yang membentuk preferensi *voting* melalui efek keanggotaan kelompok, sehingga membentuk pola perilaku.

Pendekatan ini melihat bahwa individu sebagai makhluk sosial dipengaruhi oleh norma, nilai, dan interaksi dalam kelompok sosial yang kemudian membentuk tindakan politik mereka. Pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial serta kelompok-kelompok sosial memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan para pemilih. Dasar dari pendekatan sosiologis adalah pemahaman bahwa masyarakat merupakan komponen dasar dalam studi sosial, di mana individu sebagai bagian dari masyarakat yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan hubungan sosial yang ada. Hal ini berarti pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan lingkungan tempat mereka tumbuh, seperti keluarga dan rekan sebaya. Pemilih pemula cenderung mengikuti preferensi politik dari lingkungannya karena kurangnya pengalaman atau pengetahuan untuk memilih secara independen.

Pendekatan sosiologis terdapat pada pola interaksi sosial, struktur sosial, dan peran kelompok-kelompok sosial dalam politik, termasuk bagaimana kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan. Pendekatan ini melihat politik sebagai bagian dari proses sosial yang tidak terlepas dari konteks budaya dan lingkungan sosial masyarakat tempat individu berada. Dengan kata lain, politik bukan hanya soal individu atau kekuasaan, tetapi juga soal dinamika sosial yang menentukan perilaku politik.

Dalam konteks purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula, faktor sosiologis tersebut termanifestasi dalam keberlanjutan ikatan korps, jejaring purnawirawan, serta komunitas sosial sesama purnawirawan yang tetap berfungsi sebagai referensi sosial setelah berakhirnya status dinas. Keterlekatan ini terbentuk dari ikatan individu terhadap kelompok sosial yang menjadi sumber identitas dan solidaritas. Faktor ini berperan sebagai mekanisme yang menyalurkan pengaruh struktur sosial ke tingkat individu, sehingga orientasi dan perilaku politik purnawirawan TNI

cenderung diselaraskan dengan preferensi dan kecenderungan politik yang berkembang dalam kelompoknya. Dengan demikian, perilaku memilih purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi pilihan individual, melainkan sebagai hasil dari proses sosial kolektif yang terus bekerja bahkan setelah transisi dari institusi militer ke ranah sipil.

Ini menunjukkan bahwa keterikatan sosial purnawirawan TNI berperan dalam membentuk preferensi politik. Keterlibatan dalam jaringan sesama purnawirawan serta interaksi dalam lingkungan keluarga dan komunitas menciptakan ruang pertukaran informasi politik yang intensif. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pilihan individu, tetapi juga mendorong terbentuknya keseragaman preferensi dalam kelompok.

- **Pendekatan Psikologis**

Teori psikologis Mazhab Michigan, juga dikenal sebagai Michigan Model yang dikembangkan oleh Angus Campbell dkk. dalam "*The American Voter*" (1960) menjelaskan perilaku pemilih sebagai hasil proses sosialisasi dan identifikasi psikologis dalam diri individu terhadap partai atau kandidat.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan sosial (*conformity*). Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel untuk menentukan pengaruh perilaku politik seseorang.

Oleh karena itu, pendekatan psikologis berfokus pada tiga aspek psikologi yang menjadi kajian utama, yaitu keterikatan emosional terhadap suatu partai politik atau figur, orientasi sikap terhadap isu-isu yang ada, dan pandangan terhadap kandidat.

Sebagaimana dikembangkan dalam menjelaskan bagaimana individu membangun orientasi politiknya melalui sikap, identifikasi, dan afeksi terhadap sistem politik. Pada

konteks purnawirawan TNI yang berstatus sebagai pemilih pemula, faktor psikologis ini tidak terbentuk melalui sosialisasi politik elektoral yang bertahap, melainkan melalui pengalaman panjang dalam institusi militer yang menanamkan nilai hierarki, disiplin, loyalitas, dan orientasi terhadap stabilitas. Orientasi psikologis tersebut kemudian memengaruhi tingkat dan bentuk keterlibatan politik mereka, yakni sejauh mana individu menunjukkan ketertarikan, partisipasi politik, serta afeksi terhadap aktor. Keterikatan masyarakat pada politik membuat adanya kesadaran bahwa apapun yang dirinya lakukan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara.

Dari faktor ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari orientasi psikologis individu yang menjembatani pengalaman jiwa militer yang tertanam pada purnawirawan dengan perilaku memilih mereka dalam Pemilihan Presiden 2024. Dengan demikian, perilaku memilih purnawirawan TNI adalah hasil dari proses psikologis yang membentuk pola keterlibatan politik yang khas dan berbeda dari pemilih pemula sipil pada umumnya.

- **Pendekatan Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Antony Downs dalam bukunya *"An Economic Theory of Democracy"* (1957) memandang perilaku pemilih sebagai tindakan rasional di mana individu memilih kandidat atau partai yang diyakini akan memberikan manfaat terbesar bagi dirinya.

Menurut pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan manfaat dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh.

Pendekatan ini berpandangan bahwa setiap pilihan politik yang diambil didasarkan pada pertimbangan logis dan evaluasi yang cermat terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga individu memilih opsi yang paling menguntungkan atau sesuai dengan preferensi mereka. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu

mengutamakan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Dalam kerangka teori pilihan rasional, perilaku memilih dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan individu yang didasarkan pada pertimbangan untung–rugi dan preferensi politik tertentu. Namun, asumsi rasionalitas penuh dalam teori ini perlu dikontekstualisasikan ketika diterapkan pada purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula, mengingat keterbatasan pengalaman elektoral dan akses informasi politik yang mereka miliki. Konsep *bounded rationality* dari Herbert A. Simon digunakan untuk menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam mengambil keputusan dibatasi oleh kapasitas berpikir, waktu, dan informasi yang tersedia. Dalam kondisi tersebut individu cenderung menggunakan heuristik atau aturan praktis yang telah menjadi bagian dari prosedur dan pengalaman mereka untuk mencapai keputusan yang dianggap cukup memuaskan. Individu menggunakan berbagai heuristik dalam mengambil keputusan, mengandalkan komunikasi dan reputasi sumber informasi yang dipercaya, serta menginternalisasi norma-norma perilaku dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial ataupun psikologis yang timbul ketika norma tersebut dilanggar.

Dalam konteks purnawirawan TNI, keterbatasan tersebut mendorong penggunaan strategi pengambilan keputusan yang bersifat praktis dan selektif, seperti mengandalkan heuristik tertentu dalam menilai kandidat, termasuk persepsi terhadap kepemimpinan, ketegasan, dan kesesuaian nilai dengan pengalaman institusional mereka. Dengan demikian, perilaku memilih purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula dalam Pemilihan Presiden 2024 tetap dapat dipahami sebagai tindakan rasional, tetapi rasionalitas tersebut bersifat terbatas dan kontekstual, di mana keputusan politik diambil bukan melalui kalkulasi optimal menyeluruh, melainkan melalui proses

satisficing yang dianggap paling masuk akal dalam kondisi keterbatasan yang dihadapi.

1.6.3 Konsep *Heuristic Voting*

Heuristic voting adalah mekanisme praktis dalam pengambilan keputusan memilih dengan cara pemilih menggunakan *shortcut* kognitif untuk menyederhanakan pilihan politik yang kompleks. Pemilih tidak menganalisis semua informasi, tetapi memakai petunjuk sederhana, seperti membuat keputusan dengan isyarat partai apa yang mendukung kandidat, latar belakang kandidat, identitas sosialnya, citra awal kandidat, dan rekomendasi elite. Alih-alih menganalisis secara mendalam, metode *heuristic* justru digunakan untuk mempercepat proses pemilihan, terutama saat informasi terbatas. Dengan mengandalkan aturan praktis untuk memilih kandidat berdasarkan partai, logo, atau reputasi, bukan kebijakan mendetail. Konsep ini banyak berkembang dalam literatur perilaku pemilih dan dipengaruhi oleh pemikiran seperti yang dijelaskan oleh Samuel L. Popkin dalam gagasan *low-information rationality*.

Gigerenzer dan Gaissmaier dalam buku *Heuristic Decision Making* menunjukkan bahwa dalam dunia yang tidak pasti (*uncertain world*) dan kompleks (*large worlds*), asumsi model rasional sering kali tidak terpenuhi. Maka dari itu heuristik hadir dan merupakan suatu teknik yang dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pintas secara kognitif dengan tujuan untuk mendapatkan penyederhanaan konseptual.

Pandangan klasik menganggap bahwa heuristik menghemat upaya dengan mengabaikan informasi, sehingga keputusan heuristik menyiratkan kesalahan yang lebih besar daripada keputusan rasional. Heuristik sering dikaitkan dengan intuisi yang rentan kesalahan atau bahkan irasionalitas. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa mengabaikan sebagian informasi justru dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat daripada menerima semua informasi. Fenomena ini disebut “efek kurang lebih” (*less-is-more effects*), di mana ada titik yang lebih banyak informasi menjadi berbahaya, bukan lebih baik. Keberhasilan heuristik bergantung pada seberapa baik seseorang memanfaatkan informasi yang ada. Menurut beberapa uraian diatas dapat dinyatakan bahwa heuristik merupakan suatu petunjuk praktis yang dapat digunakan untuk mempersingkat suatu cara dalam memecahkan sebuah masalah.

Ketika derasnya paparan politik dan arus informasi yang ada, tidak sedikit pemilih pada akhirnya mengatasinya dengan menggunakan jalan pintas kognitif atau heuristik. Dalam konteks purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali mempunyai hak politik penuh setelah hidup dalam netralitas instansi, kelompok ini cenderung mendapatkan masalah dalam keterbatasan informasi karena tidak punya waktu atau kemampuan untuk mempelajari setiap kandidat secara mendalam, atau bahkan jika menggali terlalu banyak informasi dapat membuat keputusan memilih menjadi sulit, maka dari itu *heuristic voting* menyederhanakannya.

Richard R. Lau dan David P. Redlawsk dalam *Advantages and Disadvantages of Cognitive Heuristics in Political Decision Making* (2001), ditemukan bahwa heuristik kognitif terkadang digunakan oleh hampir semua pemilih, dan heuristik sangat mungkin digunakan ketika situasi pilihan yang dihadapi pemilih sangatlah kompleks.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah rencana atau panduan yang menunjukkan bagaimana seorang peneliti akan menghubungkan berbagai konsep dan ide dalam penelitian mereka, sehingga memudahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin mereka teliti. Dengan kerangka berpikir, peneliti bisa lebih mudah melihat arah dan tujuan penelitian, serta bagaimana mereka akan menginterpretasikan data yang ditemukan. Kerangka berpikir berperan sebagai panduan bagi peneliti dalam merumuskan masalah, menghubungkan teori dengan data yang dikumpulkan, serta menyusun analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sistem politik demokrasi, relasi sipil–militer menempatkan militer di bawah supremasi sipil. Fenomena masuk atau ikut sertanya para purnawirawan militer ke dalam kegiatan politik pada umumnya disertai dengan perdebatan tentang beberapa isu. Yang pertama berupa perdebatan tentang pantas atau tidaknya seorang purnawirawan militer yang dibentuk untuk tidak partisan dan tidak memihak secara politis, kemudian memperlihatkan keberpihakannya sekalipun telah mengakhiri dinas aktif militernya. Hal ini umumnya dikaitkan dengan sebuah adagium universal: *old soldier never die, they just fade away*. Pendapat yang tidak menyetujui purnawirawan militer masuk dunia politik karena menganggap bahwa sampai kapan pun seorang militer tetaplah militer. Adapun pendapat yang menyetujui menyatakan bahwa setelah menyelesaikan dinas aktif militernya, mereka kembali menjadi warga negara sipil biasa yang memiliki hak sipil, termasuk hak politik, sebagaimana warga negara yang lain.

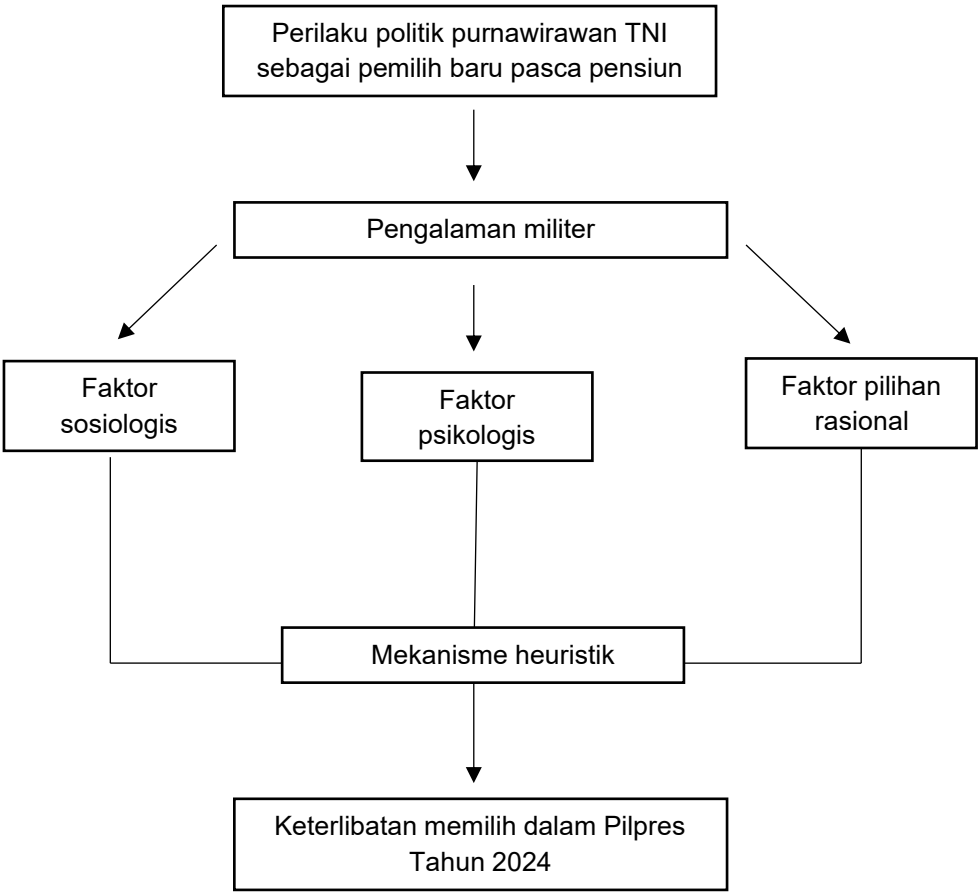
Fenomena Purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula merupakan kategori sosial yang menarik perhatian dalam politik Indonesia. Kelompok yang baru memasuki masa pensiun mengalami perubahan status mulai dari anggota militer yang berpegang teguh pada netralitas dalam politik menjadi warga negara yang memiliki hak pilih secara penuh. Perubahan status tersebut membuat mereka menjadi pemilih baru dalam konteks sebagai warga sipil pasca pensiun yang mulai menentukan pilihan politiknya pada Pilpres 2024.

Meskipun telah menjadi warga sipil dan matang secara usia, mereka tidak memulai proses memilih dari keadaan yang kosong karena membawa pengalaman militer yang telah terbentuk selama puluhan tahun berdinasi. Pengalaman inilah yang menjadi dasar utama dalam membentuk preferensi politik mereka.

Dari pengalaman tersebut memengaruhi aspek sosiologis dimana pilihan politik tidak hanya berasal dari penilaian pribadi melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang mereka lakukan. Pada aspek psikologis juga membentuk ikatan emosional yang dapat memengaruhi orientasi pilihan. Namun, meskipun dihadapkan oleh faktor-faktor tersebut, seorang pemilih juga melakukan pertimbangan rasional, dimana menilai calon kandidat dengan memperhitungkan yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan dirinya.

Ketiga faktor yang memengaruhi tersebut kemudian di proses melalui mekanisme heuristik, mekanisme yang digunakan oleh individu untuk mengambil keputusan secara sederhana dengan menggunakan *shortcut* kognitif ketika informasi dan waktu yang dimiliki terbatas atau bahkan terlalu kompleks. Proses tersebut akhirnya menghasilkan preferensi pilihan dan keterlibatan memilih purnawirawan TNI dalam Pilpres Tahun 2024.

1.8 Skema Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan tipe penelitian deskriptif, interpretasi. Pendekatan ini di gunakan untuk memahami makna, pengalaman, serta proses pembentukan preferensi politik purnawirawan TNI dalam konteks sosial dan politik.

Pendekatan interpretasi memungkinkan peneliti meneliti bagaimana individu memahami realitas politik serta bagaimana pengalaman institusional mempengaruhi perilaku mereka.

2.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kota Makassar. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena Makassar merupakan salah satu kota metropolitan besar di Indonesia bagian timur dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, serta aktivitas sosial politik di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar menampung sejumlah besar purnawirawan TNI dari berbagai matra yang memilih menetap di kota ini setelah pensiun. Kondisi ini menjadikan Makassar representatif untuk meneliti bagaimana purnawirawan beradaptasi dari lingkungan militer yang netral secara politik menuju ruang demokrasi sipil yang terbuka.

Dalam konteks pemilu, Makassar menjadi parameter politik wilayah Sulawesi Selatan di mana dinamika politik lokal yang tinggi sering kali menjadi tren nasional. Kota ini memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan menjadi ajang kompetisi ketat antar partai besar serta tokoh nasional. Dengan demikian, mengkaji perilaku politik purnawirawan TNI di Makassar dapat memberikan gambaran bagaimana kelompok ini berkontribusi terhadap perwujudan demokrasi politik dan kecenderungan ikut serta dalam kegiatan elektoral tingkat nasional.

Sebagai kota dengan masyarakat yang heterogen dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial ekonomi, Makassar menghadirkan konteks sosial yang kaya untuk penelitian perilaku politik. Keragaman ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana interaksi antara latar belakang sosial purnawirawan dan dinamika masyarakat urban memengaruhi orientasi politik mereka. Selain itu, heterogenitas ini juga memberi ruang untuk membandingkan pengaruh faktor sosial seperti

jaringan sosial dan keluarga terhadap pilihan politik yang rasional atau emosional. Pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris yang kuat untuk kajian perilaku politik, terutama dalam memahami bagaimana nilai-nilai militer bertransformasi dalam praktik politik demokratis di tingkat lokal.

2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, dengan memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah purnawirawan TNI yang baru mengakhiri masa dinas, orang terdekatnya, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk menunjukkan bagaimana aktor lain memandang kelompok purnawirawan serta melihat bagaimana perbandingan persepsi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang baru saja bertransisi dari kehidupan militer. Pada penelitian ini, informan yang telah terlibat, yakni:

a. Informan kunci

1. Peltu (Purn) Burhanudin, Purnawirawan Tahun 2019.
2. Peltu (Purn) Amiruddin, Purnawirawan Tahun 2019.
3. Serma (Purn) Sahabuddin, Purnawirawan Tahun 2020.
4. Mayor (Purn) Pattopoi, Purnawirawan Tahun 2019.
5. Serma (Purn) Anwar, Purnawirawan Tahun 2019
6. Serma (Purn) Muhammad Syukur, Purnawirawan Tahun 2023.
7. Kolonel Inf. (Purn.) Sahabuddin, Purnawirawan Tahun 2024 sekaligus Kepala Asrama Perwira Kodam XIV HND Komplek Kowilhan III.

b. Informan pendukung

1. Ibu Amir, keluarga dari Peltu (Purn) Amiruddin.
2. Letkol (Purn) William E. Blake, Purnawirawan Tahun 2016.
3. Mayor (Purn) Andi Aziz, Purnawirawan Tahun 2018.

4. Mayor (Purn) La Ode Yijo, Purnawirawan Tahun 2025.
5. Badaruddin, akademisi Politeknik Maritim AMI Makassar (POLIMARIM) sekaligus rekan Mayor (Purn) La Ode Yijo.
6. Dr. Rahmat Muhammad, S.Sos., M.Si., akademisi program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Hasanuddin (Unhas).

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sugiyono (2018:308) mendeskripsikan data primer sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek penelitian. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (*key informan*), yaitu mereka aktor/pelaku langsung dalam fenomena yang diteliti, dan informan pendukung, yang di mana mereka adalah individu yang punya pengetahuan luas dan menyeluruh tentang fenomena tersebut, termasuk informasi tentang informan kunci, seringkali posisinya strategis seperti pimpinan atau tokoh yang paham isu secara keseluruhan. Informan di pilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni:

A. Informan kunci:

1. Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 dan berdomisili di kota Makassar, sebagai Informan utama dalam penelitian. Data yang diperoleh digunakan untuk menggali proses pembentukan perilaku memilih, pertimbangan dalam menentukan pilihan politik, serta bagaimana pengalaman sebagai purnawirawan TNI

memengaruhi preferensi politik mereka pada Pilpres 2024.

B. Informan pendukung:

1. Keluarga atau rekan purnawirawan TNI. Data dari keluarga atau rekan informan digunakan untuk memperoleh perspektif eksternal mengenai kebiasaan berdiskusi mengenai politik, lingkungan sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik informan kunci. Informasi ini juga berfungsi untuk menguji konsistensi data yang disampaikan oleh informan kunci.
2. Tokoh Masyarakat. Data dari tokoh masyarakat digunakan untuk memahami kondisi sosial politik di lingkungan tempat tinggal purnawirawan TNI, termasuk dinamika sosial masyarakat dan pengaruh lingkungan sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku memilih informan kunci.
3. Akademisi. Akademisi digunakan sebagai informan pendukung untuk memberikan interpretasi ilmiah terhadap fenomena perilaku politik purnawirawan TNI. Hasil wawancara dari akademisi digunakan untuk memperkuat analisis serta membandingkan temuan lapangan dengan konsep-konsep yang berkembang dalam kajian sosial politik.
4. purnawirawan TNI lama dan baru. Digunakan sebagai data pembanding untuk membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengalaman politik, tingkat partisipasi, sumber informasi, serta perubahan orientasi politik setelah pensiun. Dengan demikian, peneliti dapat memahami apakah pengalaman sebagai pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan purnawirawan yang telah mengikuti

beberapa pemilu sebelumnya maupun yang baru usai menjalani MPP.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2018:308) mendeskripsikan data sekunder sebagai sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder sebagai penunjang data primer bersumber dari buku, jurnal, skripsi, yang digunakan untuk memperoleh landasan konseptual teoritis, mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu, membandingkan temuan penelitian, serta memperkuat argumentasi ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih sehingga dapat membantu melihat persamaan, perbedaan, dan celah penelitian (*research gap*). Adapun data resmi perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, dan (KPU) Kota Makassar, untuk memperoleh data faktual mengenai hasil Pilpres 2024, tingkat partisipasi pemilih, serta kondisi elektoral di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Serta dokumen arsip administratif Kodim 1408 Makassar, arsip administratif Kodaeral VI Makassar, arsip administratif Lanud Sultan Hasanuddin digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil dan jumlah purnawirawan TNI di kota Makassar.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik-teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh valid dan reliabel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1) Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana satu orang (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada orang lain (yang diwawancarai) untuk mendapatkan informasi, pendapat, atau pengalaman. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah dan indikator penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengemukakan pengalaman, pandangan, dan alasan yang melatarbelakangi perilaku memilih mereka. Sebelum wawancara

dilaksanakan, peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, serta meminta persetujuan informan untuk berpartisipasi dalam wawancara. Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara mengenai pengalaman pertama menggunakan hak pilih pada Pemilihan Presiden 2024, proses pembentukan preferensi politik, sumber informasi politik, serta faktor yang memengaruhi keputusan memilih. Selama proses wawancara, peneliti juga melakukan pendalaman melalui pertanyaan lanjutan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas, serta memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh informan.

Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer secara mendalam mengenai pengalaman dan pertimbangan politik purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula pada Pemilihan Presiden 2024. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami proses pembentukan perilaku memilih, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik informan, serta memperoleh informasi yang komprehensif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data hasil wawancara selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai perilaku politik purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula di Kota Makassar.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, rekaman audio, data statistik, laporan penelitian terdahulu, karya ilmiah, serta berbagai studi pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi, seperti data hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan KPU Kota Makassar, serta dokumen administratif yang diperoleh dari instansi terkait.

Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh informasi yang mendukung data hasil wawancara. Data dokumentasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris penelitian, memperkuat landasan teoritis, serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari informan. Dengan

demikian, teknik dokumentasi berperan dalam meningkatkan kelengkapan dan kredibilitas hasil penelitian sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta lebih banyak menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dibutuhkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen sebagai data pendukung untuk meningkatkan kredibel dari hasil wawancara. selanjutnya, data-data yang diperoleh peneliti didiskusikan dengan informan menggunakan pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti dari data-data yang telah terkumpul dengan merekam sebanyak mungkin aspek yang diteliti. Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam proses analisis yang dilakukan dengan menghimpun data primer dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian, data primer diperoleh melalui wawancara dengan purnawirawan TNI sebagai informan kunci serta informan pendukung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dokumen lain yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mencatat seluruh informasi yang diperoleh secara sistematis dan objektif sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan yang disampaikan oleh informan dan kemudian hasil wawancara tersebut ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan untuk memudahkan proses analisis.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018) semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, beragam, dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan proses reduksi data agar data yang telah dikumpulkan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian, serta

mengesampingkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan membaca seluruh hasil transkrip wawancara secara berulang, kemudian mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan proses pembentukan perilaku memilih purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula pada Pemilihan Presiden 2024. Selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi, penggunaan heuristik dalam pengambilan keputusan politik, serta bentuk keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) yang dialami informan. Dengan demikian, proses reduksi data membantu peneliti memusatkan perhatian pada data yang paling relevan sehingga analisis menjadi lebih sistematis dan mendalam.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan untuk memahami hubungan antar hasil wawancara, menemukan pola, serta menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Setiap data dianalisis dengan menghubungkan hasil wawancara informan, data dokumentasi, serta teori yang digunakan sebagai landasan analisis. Penyajian data dilengkapi dengan kutipan hasil wawancara yang relevan untuk memperkuat interpretasi. Melalui penyajian data tersebut dapat diidentifikasi pola pembentukan preferensi politik, persamaan dan perbedaan pengalaman antar informan, serta hubungan antara faktor sosial, psikologis, dan rasional dalam membentuk perilaku memilih purnawirawan TNI sebagai pemilih pemula pada Pilpres 2024.

4. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep pendukung untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dilakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antara informan utama dan informan pendukung serta mencocokkannya dengan data dokumentasi ataupun informasi dari informan pendukung yang

relevan. Apabila seluruh data menunjukkan konsistensi dan didukung oleh bukti empiris yang memadai, maka kesimpulan yang dihasilkan dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.